

**PENEGAKAN HUKUM OLEH DIREKTORAT KEPOLISIAN
PERAIRAN DAN UDARA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA
BARAT TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI BAHAN BAKAR
MINYAK OLEH NAKHODA KAPAL NEGARA SB RIMATA GT.35**

ARIF KURNIAWAN, 24151056, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Humaniora,
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Dharma Andalas

ABSTRAK

Penyalahgunaan minyak oleh nakhoda kapal diduga memenuhi unsur Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam perkara Laporan Polisi Nomor LP/11/IX/2025/SPKT.DITPOLAIRUD/POLDA SUMATERA BARAT yang melibatkan Kapal SB RIMATA milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, penyidik Ditpolairud Polda Sumatera Barat awalnya menduga adanya tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kebakaran kapal. Namun, kejaksan menilai kebakaran tersebut merupakan akibat kelalaian awak kapal, sehingga penanganan perkara lebih difokuskan pada unsur kelalaian karena tidak terbukti adanya hubungan langsung antara penyimpangan minyak dan terjadinya kebakaran. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: 1) Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan penegakan hukum oleh Ditpolairud Polda Sumbar terhadap tindak pidana korupsi korupsi bahan bakar minyak oleh nakhoda kapal? 2) Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban hukum nakhoda kapal PNS dalam tindak pidana korupsi BBM guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di wilayah hukum Polda Sumbar? 3) Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Ditpolairud Polda Sumbar dalam melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap tindak pidana tersebut, terutama jika pelakunya memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)? Jenis penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan teknik wawancara semi terstruktur. Jenis pendekatan yang digunakan yaitu studi kasus (*case approach*) dan didapatkan kesimpulan yaitu penegakan hukum oleh Ditpolairud Polda Sumatera Barat diawali dengan penyidikan atas laporan kebakaran Kapal SB Rimata. Dalam proses penyidikan dilakukan olah TKP, penggeledahan, penyitaan, serta pemeriksaan saksi dan tersangka hingga terungkap bahwa pemindahan BBM dilakukan atas perintah nakhoda kapal yang berstatus ASN untuk dijual demi kepentingan pribadi. Pada awalnya perkara dikonstruksikan sebagai tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kebakaran sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHP, namun berdasarkan fakta yang ditemukan penyidik, perbuatan tersebut juga memenuhi unsur penyalahgunaan aset negara sehingga pelaku dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 604 KUHP. Adapun hambatan yang dihadapi meliputi perbedaan konstruksi hukum, kesulitan membuktikan kerugian negara, keterbatasan alat bukti akibat kebakaran, serta perlunya koordinasi karena pelaku berstatus ASN.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Bahan Bakar Minyak

Law Enforcement by the Water and Air Police Directorate of the West Sumatra Regional Police Regarding the Crime of Fuel Oil Corruption Committed by the Captain of the State-Owned Vessel SB RIMATA (GT 35)

ARIF KURNIAWAN, 24151056, Faculty of Law, Social Sciences, and Humanities,
Law Study Program, Dharma Andalas University

ABSTRACT

The misuse of fuel oil by the ship's captain is alleged to satisfy the elements of Article 604 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. In the case registered under Police Report Number LP/11/IX/2025/SPKT. DITPOLAIRUD/POLDA SUMATERA BARAT involving the vessel SB RIMATA, owned by the Mentawai Islands Regency Government investigators from the West Sumatra Regional Police Water and Air Directorate (Ditpolairud) initially suspected a crime of corruption linked to a fire on the vessel. However, the Public Prosecutor's Office determined that the fire resulted from crew negligence; consequently, the case proceedings focused on the element of negligence, as no direct link was proven between the fuel oil misappropriation and the occurrence of the fire. The research questions addressed in this study are: 1) What is the mechanism for law enforcement by the West Sumatra Regional Police Ditpolairud regarding the crime of fuel oil corruption committed by the ship's captain? 2) What form of legal liability applies to a Civil Servant (PNS) ship captain involved in fuel oil corruption to ensure legal certainty and justice within the jurisdiction of the West Sumatra Regional Police? 3) What obstacles does the West Sumatra Regional Police Ditpolairud face in strictly enforcing the law against this crime, particularly when the perpetrator holds the status of a Civil Servant (PNS)? This study employs an empirical-juridical research method utilizing semi-structured interviews. This study employs a case study approach and concludes that law enforcement efforts by the Water and Air Police Directorate (Ditpolairud) of the West Sumatra Regional Police began with an investigation into the fire aboard the vessel SB Rimata. The investigative process involved a crime scene examination, searches, asset seizures, and the questioning of witnesses and suspects; this revealed that the transfer of fuel had been carried out on the orders of the ship's captain—a civil servant for the purpose of personal gain. Initially, the case was framed as an act of negligence resulting in a fire, as stipulated in Article 188 of the Criminal Code; however, facts uncovered by investigators indicated that the act also constituted the misuse of state assets, leading to the perpetrator facing criminal liability under Article 604 of the Criminal Code. Challenges encountered included differing legal interpretations, difficulties in proving state financial loss, limited evidence due to the fire damage, and the need for coordination arising from the perpetrator's status as a civil servant.

Keywords: *Law Enforcement, Criminal Offense Corruption, Fuel*